

**PERSEPSI KARAKTERISTIK INDIVIDU TENTANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta)**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

TOPAN GHAZALA
B 200 040 291

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan terhadap terciptanya *good governance* sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat di Indonesia. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah terus berupaya untuk bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawaban publiknya. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diluncurkan oleh wakil presiden pada tanggal 6 Juli 2005.

Dengan diterbitkannya PP tersebut, Indonesia memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara. Dengan adanya standar ini, perbandingan dan pengukuran antarpelaporan keuangan dapat dilakukan, sehingga praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dapat dicegah dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Pemerintah daerahpun telah banyak yang mengikuti pelatihan yang dapat memfasilitasi mereka untuk menyusun Laporan Keuangan berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, baik yang diselenggarakan oleh Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI maupun oleh pihak swasta yang lain. Tetapi ternyata sampai saat ini, pada umumnya Pemerintah Daerah belum siap menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan amanat PP nomor 24 tahun 2005.

Tuntutan terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi amanat Undang-undang dalam menyajikan Laporan Keuangannya harus segera

dipenuhi untuk diaudit oleh BPK. Kegagalan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan Laporan Keuangannya akan merugikan mereka sendiri, karena mereka tidak akan dapat memenuhi tujuan khusus pelaporan keuangan seperti menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Keberadaan IAI di Indonesia masih belum mampu menjamin independensi Akuntan Publik terhadap opini yang diberikan kepada kliennya. Hal ini bisa terjadi karena IAI telah membentuk Dewan SAK, dimana masih ada anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. Dengan kata lain, adanya kepentingan pribadi anggota IAI yang berkaitan dengan bisnisnya sebagai akuntan publik akan berpengaruh terhadap independensi dalam penetapan Standar Audit yang dikembangkan di Indonesia. Begitu pula untuk sektor publik yang menyangkut dana masyarakat yang cukup besar seharusnya mendapatkan pengawasan memadai yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut. Untuk menjaga independensi dan integritas dalam melaksanakan tugas dari pihak publik atau masyarakat, maka badan tersebut bernaung di bawah lembaga legislatif negara.

Banyak faktor yang dapat menunjang persepsi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, salah satunya adalah karakter individu. Mengingat karakter individu merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam persepsi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat membawa perubahan bagi pola kehidupan manusia. Hal ini membawa perubahan tersendiri bagi individu. Apalagi individu tersebut berada dalam lingkungan organisasi. Mereka harus dapat membenahi diri karena apabila tidak, akan tersisihkan dari rekan-rekannya. Agar eksistensi diri tetap terjaga, maka setiap individu menginginkan karirnya meningkat karena karir seseorang juga mempengaruhi penghasilan. Misalnya, seorang pegawai negeri dengan jabatan pelaksana tentunya menginginkan jabatan sebagai seorang kepala seksi. Begitu pula kepala seksi menginginkan jabatan menjadi kepala dinas. Adanya keinginan tersebut mengakibatkan pegawai harus mempunyai perencanaan karir yang matang. Salah satu langkah yang ditempuh untuk memenangkan persaingan agar mampu bersaing yaitu karyawan dituntut untuk mempunyai *skill, knowledge ability* (keterampilan, pengetahuan, kemampuan) yang tinggi agar dapat menjadi sumber daya manusia yang mampu bersaing, mampu memenuhi kebutuhan organisasi dan bersaing diluar organisasi tempat mereka bekerja secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERSEPSI KARAKTERISTIK INDIVIDU TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Pemerintah kota Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan persepsi tentang standar akuntansi pemerintahan antara keahlian, pengalaman kerja, usia dan pendidikan pada pegawai pemerintah kota Surakarta?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian studi kasus ini, permasalahan dibatasi pada variabel yang diukur untuk mengetahui kemampuan pegawai Pemerintah Kota Surakarta dalam mempersepsikan PP Nomor 24 tahun 2005. Adapun variabel yang akan diukur yakni keahlian, pengalaman kerja, usia, dan pendidikan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan persepsi tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara keahlian, pengalaman kerja, usia dan pendidikan pada pegawai Pemerintah Kota Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menyajikan bukti bahwa terdapat perbedaan persepsi pada karakter individu yang meliputi keahlian,

pengalaman kerja, usia dan pendidikan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di masa mendatang.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau acuan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam penelitian bidang akuntansi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan penelitian ini sesuai dengan tujuannya, maka penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab dengan garis besar isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori secara konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Bab ini mencakup tentang teori-teori yang meliputi pengertian sektor publik,

akuntansi sektor publik, penyajian laporan keuangan pemerintahan, karakteristik individu, keahlian, pengalaman kerja, usia, pendidikan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu meliputi: populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan. Adapun keterbatasan penelitian berdasarkan hasil penelitian tersebut.